

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN****ANALYSIS REALIZATION OF THE REGIONAL EXPENDITURE BUDGET IN TOMOHON
GOVERNMENT CITY AND SOUTH MINAHASA GOVERNMENT REGENCY**

Oleh:
Cenissa Sajow¹
Jenny Morasa²
Heince R. N Wokas³

^{1,2,3} **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email:

¹ Cenissa14@gmail.com

² jennymorasa@hotmail.com

³ heince_wokas@yahoo.com

Abstrak: Belanja merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis realisasi anggaran belanja daerah pada pemerintah Kota Tomohon dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013-2015. Hasil penelitian ini yaitu dari tingkat efektivitas belanja, Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif.

Kata Kunci: *belanja, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan*

Abstract: *Regional Expenditure are liability area recognized as a reduction in the net asset value of the relevant fiscal period. The purpose of this study was to analyze the budget realization tomohon city and south minahasa regency. The data used is the realization report 2013-2015 fiscal year budget. The results of this study is on the level of effectiveness of spending, the Tomohon city more effective than the South Minahasa Regency. The efficiency level of spending, the Tomohon city more efficient than South Minahasa Regency. Tomohon city and South Minahasa Regency showed a positive expenditure growth.*

Key Word: *expenditure, effective, efficiency, growth*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyalenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran belanja dan memperjelas efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran belanja serta perkembangan pertumbuhan belanja dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi Sektor Publik**

Halim (2012:3) menjelaskan Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Meliala dkk (2011:1-2) mengemukakan akuntansi sektor publik terdiri atas :

1. Akuntansi Pemerintahan, yaitu Akuntansi Pusat dan Akuntansi Daerah;
2. Akuntansi Rumah Sakit;
3. Akuntansi Pendidikan, dan;
4. Akuntansi Lembaga Sosial Masyarakat.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu : penyedia informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja dan pelaporan kinerja.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Laporan Operasional;
-

4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Soetjipto (2011:61) juga mengemukakan secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Restrospektif
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Organisasi
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber fakta dan Gambaran

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Renyowijoyo (2011:77) menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur, dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pelaksanaan lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Anggaran

Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Halim (2014:47) menjelaskan anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan

dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

1. Proses penentuan penerimaan daerah
2. Proses penentuan belanja rutin
3. Proses penentuan belanja bangunan

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari kinerja aparatur pemerintahan daerah.

Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua mendefinisikan Belanja Daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi :

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang
 - c. Bunga
 - d. Subsidi
 - e. Hibah
 - f. Bantuan sosial
2. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi :
 - a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.
Belanja lain-lain atau belanja takterduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer
Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja langsung dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
2. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja bunga
 - c. Belanja subsidi
 - d. Belanja hibah
 - e. Belanja bantuan sosial
 - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan milik pemerintah, yang terdiri atas dua jenis laporan keuangan yaitu : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian Terdahulu

Tenda (2014) , Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado T.A 2010-2012. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010 – 2012 khususnya belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja infrastruktur jalan, dan irigasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan/Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Manado diukur dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suatu tolak ukur kinerja keuangan yang berkualitas sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 299 (2), pasal 314. Dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 Pasal 1 dan 16. Pangkey (2015), Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya adalah Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas dan efisiensi belanja langsung tidak efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis data penelitian kuantitatif dalam hal ini berupa laporan realisasi anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk menganalisis Belanja Daerah menggunakan rasio efisiensi belanja.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon dan Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April-Agustus 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi kepustakaan maupun membaca melalui internet mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan.
2. Mengidentifikasi, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan dan mengolah data yang telah terkumpul agar informasi yang tersaji akan lebih mudah untuk dianalisis.
4. Menganalisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Mahmudi (2011:21) menyatakan bahwa untuk mengukur pelaksanaan realisasi belanja sebagai berikut :

1. a. Analisis Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

b. Analisis Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Mahmudi (2010:142) pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } n = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } n - \text{Realisasi Belanja } n-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } n-1} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Rasio Efektivitas**

a. Tomohon

1. Belanja Operasi

$$\text{Tahun 2013} = \frac{327.618.619.755}{352.456.687.942} \times 100\% = 92,95\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{368.371.685.971}{418.059.708.247} \times 100\% = 88,11\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{425.397.779.852}{474.643.216.235} \times 100\% = 89,62\%$$

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Belanja Operasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria
2013	Rp.352.456.687.942	Rp.327.618.619.755	92,95%	Efektif
2014	Rp.418.059.708.247	Rp.368.371.685.971	88,11%	Cukup Efektif
2015	Rp.474.643.216.235	Rp.425.397.779.852	89,62%	Cukup Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja operasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon pada tahun 2013 tingkat efektivitas 92,95% (efektif). Kemudian tahun 2014, tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 88,11% (cukup efektif). Dan di tahun 2015, tingkat efektivitas meningkat menjadi 89,62% (cukup efektif).

2. Belanja Modal

$$\text{Tahun 2013} = \frac{123.784.118.796}{132.805.157.852} \times 100\% = 93,20\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{146.198.253.417}{153.074.983.744} \times 100\% = 95,50\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{129.824.391.601}{143.480.366.613} \times 100\% = 90,48\%$$

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Belanja Modal Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria
2013	Rp.119.386.043.309	Rp.102.467.563.469	85,82%	Cukup Efektif
2014	Rp.158.868.628.263	Rp.132.953.173.803	83,68%	Cukup Efektif
2015	Rp.237.848.122.101	Rp.197.917.924.233	83,21%	Cukup Efektif

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Data Olahan)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2013 adalah sebesar 85,82% (cukup efektif). Tahun 2014, tingkat efektivitas sebesar 83,68% (cukup efektif). Pada tahun 2015, tingkat efektivitas sebesar 83,21% (cukup efektif).

Rasio Efisiensi

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Belanja Operasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Kriteria
2013	Rp. 327.618.619.755	Rp. 451.402.738.551	72,57%	Efisien
2014	Rp. 368.371.685.971	Rp. 514.569.939.388	71,58%	Efisien
2015	Rp. 425.397.779.852	Rp. 555.223.362.453	76,61%	Efisien

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon (Data Olahan)

Tabel di atas menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tomohon Tahun 2013-2015. Tahun 2013, tingkat efisiensi sebesar 72,57% (efisien). Tahun 2014, tingkat efisiensi sebesar 71,58% (efisien). Dan tahun 2015, tingkat efisiensi sebesar 76,61% (efisien).

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Belanja Modal Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Kriteria
2013	Rp. 102.467.563.469	Rp. 561.242.693.084	18,25%	Sangat Efisien
2014	Rp. 132.953.173.803	Rp. 689.167.009.246	19,29%	Sangat Efisien
2015	Rp. 197.917.924.233	Rp. 808.444.061.825	24,48%	Sangat Efisien

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Data Olahan)

Tabel di atas menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013-2015. Pada tahun 2013, tingkat efisiensi 18,25% (sangat efisien). Tahun 2014, tingkat efisien 19,29% (sangat efisien) dan tahun 2015, tingkat efisien 24,48% (sangat efektif).

Analisis Pertumbuhan Belanja

Untuk menghitung pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2013-2014 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } n = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } n - \text{Realisasi Belanja } n-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } n-1} \times 100$$

Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2013-2014

Uraian	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Pertumbuhan	
			Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja	451,402,738,551	514,569,939,388	63,167,200,837	13.99
Belanja Operasi	327.618.619.755	368.371.685.971	40,753,066,216	12.43
Belanja Modal	123.784.118.796	146,198,253,417	22,414,134,621	18.10

Sumber : Data Olahan Tahun 2013-2014

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan realisasi belanja tahun 2014 adalah sebanyak Rp63.167.200.837 atau sebesar 13,99% dari total pertumbuhan realisasi belanja tahun 2013. Total pertumbuhan realisasi belanja operasi tahun 2014 adalah sebanyak Rp40.753.066.216 atau sebesar 12,43% dari total pertumbuhan belanja operasi tahun 2013. Total pertumbuhan realisasi belanja modal tahun 2014 adalah sebanyak Rp22.414.134.621 atau sebesar 18,10% dari total pertumbuhan belanja modal tahun 2013.

Tabel 6. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Uraian	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Pertumbuhan	
			Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja	561,242,693,084	689,167,009,246	127,924,316,162	22.79
Belanja Operasi	458,745,129,615	556,213,835,443	97,468,705,828	21.24
Belanja Modal	102,467,563,469	132,953,173,803	30,485,610,334	29.75

Sumber : Data Olahan Tahun 2013-2014

Berdasarkan tabel di atas total pertumbuhan belanja tahun 2014 adalah sebanyak Rp127.924.316.162 atau sebesar 22,79% dari total pertumbuhan belanja tahun 2013. Total pertumbuhan belanja operasi tahun 2014 adalah sebanyak Rp 97.468.705.828 atau sebesar 21,24% dari total pertumbuhan belanja operasi tahun 2013. Total pertumbuhan belanja realisasi belanja modal tahun 2014 adalah sebanyak Rp30.485.610.334 atau sebesar 29.75% dari total pertumbuhan belanja modal tahun 2013.

Pembahasan**Analisis Rasio Efektivitas**

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Belanja untuk belanja operasi Pemerintah Kota Tomohon untuk tahun 2013 berada pada tingkat 72,75%, tahun 2014 berada pada tingkat 71,58%, dan pada tahun 2015 berada pada tingkat 76,61%. Untuk belanja modal tingkat efisiensi tahun 2013 berada pada tingkat 27,42%, tahun 2014 berada pada tingkat 28,41%, tahun 2015 berada pada tingkat 23,38%.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk perhitungan tingkat efisiensi belanja pada belanja operasi tahun 2013 berada pada tingkat 81,73%, tahun 2014 berada pada tingkat 80,73%, tahun 2015 berada pada tingkat 75,49%. Untuk belanja modal pada tahun 2013 tingkat efisiensi belanja berada pada tingkat 18,25%, tahun 2014 berada pada tingkat 19,29%, dan tahun 2015 berada pada tingkat 24,48%.

Tingkat efektivitas belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan efektif, dimana realisasi anggaran belanja yang dicapai oleh Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun Kota Tomohon lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola belanja di daerahnya masing-masing.

Analisis Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup baik dalam melakukan penghematan anggaran belanja sehingga dikategorikan efisien. Walaupun masih lebih unggul Pemerintah Kota Tomohon dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2013 sampai 2014 untuk belanja operasi dikategorikan cukup efektif.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan perhitungan mengenai tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Tomohon, hasil analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2013-2015 dapat dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2014 adalah Rp 63.167.200.837 atau sebesar 13,99% dari total realisasi belanja tahun 2013 dan tahun 2015 tingkat pertumbuhan belanja sebesar Rp 40,653,423,065 atau sebesar 7,90% dari total realisasi belanja tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan Rp 127.924.316.162 atau sebesar 22,79% dari total realisasi belanja tahun 2013 dan ditahun 2015 tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 293,874,122,437 atau sebesar 57,11% dari total realisasi belanja tahun 2014.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan kriteria penilaian efisiensi belanja dari tahun 2013-2015 adalah efisien.
2. Tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2013-2015 dapat dikategorikan efektif dalam mengelola anggaran belanja tersebut.
3. Hasil analisis pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun anggaran 2013-2015 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja.

Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kiranya lebih memperhatikan lagi pengelolaan anggaran belanja yang telah disusun agar dapat d realisasikan dengan baik.
2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian tentang Belanja Daerah agar dapat dibandingkan dengan data-data terbaru mengenai Realisasi Anggaran Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Analisis Sektor Publik*. Cetakan Kedua UII Press. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Meliala, S.Tulis, dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Semesta Media.
- Tenda Mirki. 2014, Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado T.A 2010-2012. *Jurnal EMBA*. Vol. 2 No. 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4378>. Hal. 638-645.
- Pangkey Imanuel. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581>. Hal. 33-43.
- Renyowijoyo, Maindro. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokusmedia.Bandung.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Soetjipto, Kery. Prawoto, Sudi. 2011. *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara*. Mitra Wacana Media, Jakarta.